Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-2 Juni
(5 s.d. 11 Juni 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2024: OPTIMIS DAN WASPADA

Edmira Rivani
Analis Legislatif Ahli Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah bersama DPR RI dalam pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang merupakan landasan penting dalam penyusunan RAPBN 2024. ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3%-5,7% menjadi 5,1%-5,7%. Hal ini disebabkan sektor utama pendorong PDB yang diestimasi melandai pada tahun depan, baik konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor. Konsumsi masih menghadapi tantangan dari sisi tekanan inflasi yang berisiko menggerus daya beli masyarakat, sementara ruang fiskal lebih ketat dibandingkan dengan 2020-2022. Adapun, investasi diprediksi terhambat karena pelaku usaha melakukan *wait and see* hingga terbentuknya pemerintahan baru. Sementara itu, kinerja ekspor tertekan oleh normalisasi harga komoditas. Di sisi lain, secara historis pertumbuhan ekonomi pada tahun transisi selalu turun sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. Inilah yang kemudian melandasi Komisi XI DPR meminta pemerintah lebih realistis dalam memasang angka sasaran ekonomi tahun depan.

Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%, sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp14.700-15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49-6,91%. Untuk asumsi minyak dan gas, disepakati Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$75-80 per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP). Termasuk menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *sustainable* dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91-10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92-10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan sebesar 6,5-7,5%, dan rasio gini sebesar 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

Atensi DPR

Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI perlu mendorong pemerintah dalam optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mewujudkan pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 8 Juni 2023;
fiskal.kemenkeu.go.id, 8 Juni 2023;
kemenkeu.go.id, 8 Juni 2023;
Media Indonesia, 9 Juni 2023;
neraca.co.id, 7 Juni 2023.

Isu Sepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial
©PuslitBK2023